BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1. Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung selain sebagai ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat keiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan urat nadi perekonomian Provinsi Lampung, dan menjadi daerah yang terus terbuka dan semakin meluas. Hal ini tak terlepas dari Provinsi Lampung sebagai *hinterland*, yang merupakan akses pintu masuk dan keluar pulau jawa dan Sumatera Hingga tahun 1977 – 1978 Provinsi Lampung menjadi tujuan program transmigrasi umum, Lampung menjadi "Indonesia Mini". Letaknya yang strategis, sebagai gerbang Jawa-Sumatera, menjadikan Lampung lintas berbagai aktivitas ekonomi, budaya, dan politik. Keterbukaan geografis Lampung memungkinkan bertumbuh dan masuknya pengaruh budaya luar melalui pintu masuk yang dilewati pelaku ekonomi, budaya, dan politik.

Secara georafis Kota Bandar Lampung terletak 5°20' sampai dengan 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Ibu Kota Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera.

Meski Lampung berada di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung mayoritas orang Jawa. Tak kurang dari 70% penduduknya berasal dari tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat (Banten), penduduk asli sekitar 25%, dan

sisanya berasal dari suku-suku lain terutama dari Sumatera. Secara ideologispolitis, heterogenitas penduduk di Provinsi Lampung memang amat dekat dengan identitas nasionalis yang direpresentasikan lewat partai politik yang beridiologi nasionalis demokratis.

Menurut Situs web resmi : http://www.bandarlampungkota.go.id/(2008), Kota Bandar Lampung memiliki luas 207,50 km² dengan populasi penduduk sebanyak 912.087 jiwa, dari jumlah tersebut penduduk asli Lampung hanya sekitar 25%; kepadatan penduduk 4.597 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 3,79 % per tahun.

Secara geografis, ibukota Provinsi Lampung ini berada di pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut DKI Jakarta. Didukung oleh posisi yang strategis, menyebabkan mobilitas penduduk serta lalu lintas di setiap ruas jalan protokol di Bandar Lampung cenderung padat dan semerawut. Bandar Lampung memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya, namun pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung tidak berbanding lurus dengan tuntutan perkembangan perkotaan.

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan keresidenan, dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukotanya Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti menjadi

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan tahun 1999 berubah menjadi Kota Bandar Lampung.

Sejak tahun 1965 sampai tahun 2010 Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa walikota/KDH Tingkat II, berturut-turut tabel di bawah memperlihatkan nama-nama Walikota Bandar Lampung dalam periode tertentu :

Tabel 4.1.

Daftar Nama Walikota Bandar Lampung
Periode 1956 s/d 2010

No.	Nama Walikota/KDH Tingkat II	Periode
1	SUMARSONO	1956-1957
2	H. ZAINAL ABIDIN PA.	1957-1963
3	ALIMUDIN UMAR	1963-1969
4	Drs. H.M. THABRANI DAUD	1969-1976
5	Drs. H. FAUZI SALEH	1976-1981
6	Drs. H. ZULKARNAIN SUBING	1981-1986
7	Drs. H. A. NURDIN MUHAYAT	1986-1995
8	Drs. H. SUHARTO	1996-2006
9	EDY SUTRISNO, S.Pd, M.Pd.	2006-2010
10	Drs. H. HERMAN HN, MM.	2010 s/d Sekarang

Sumber: BPS, Bandar Lampung Dalam Angka 2011

Dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka Kota Bandar Lampung diperluas

dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan Sk Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. (Sumber: BPS, Bandar Lampung Dalam Angka 2011).

Berikut tabel 2.2 di bawah memperlihatkan banyaknya jumlah kelurahan, Lingkungan, dan Rukun Tetangga (RT) menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung:

Tabel 4.2.

Banyaknya Kelurahan, Lingkungan, dan RT Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2010

	JUMLAH		
Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	RT
Teluk Betung Barat	8	23	173
Teluk Betung Selatan	11	26	302
Panjang	7	18	204
Tanjung Karang Timur	11	25	271
Teluk Betung Utara	10	21	238
Tanjung Karang Pusat	11	26	253
Tanjung Karang Barat	6	15	157
Kemiling	7	20	267

Kedaton	8	23	256
Rajabasa	4	8	94
Tanjung Seneng	4	10	100
Sukarame	5	14	173
Sukabumi	6	16	163
JUMLAH	98	245	2651

Sumber: BPS, Bandar Lampung Dalam Angka, 2011

Sejak berdirinya Kota Bandar Lampung upaya peningkatan potensipotensi yang ada terus dilakukan dengan upaya peningkatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang lebih terpadu dan terarah agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Perkembangan pembangunan yang digerakkan pemerintah, swasta dan masyarakat, sebagian dilakukan dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi sebagai terobosan terhadap tatanan yang ada untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta persiapan menghadapi era globalisasi.

4.2. Pemilukada Kota Bandar Lampung

Pemilukada Kota bandar Lampung telah digelar pada 30 Juni 2012 lalu. Keenam pasangan calon yang bertarung memperebutkan kursi walikota dan wakil walikota itu masing-masing Sauki Shobier-Syamsul Rizal, Herman HN-Thabroni Harun, Kherlani-Heru Sambodo, kemudian, Eddy Sutrisno-Hantoni Hasan, Dhomiril Hakim-Sugiyanto dan Nurdiono-Dian Kurnia Laratte.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2008 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala diantaranya menyatakan, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan dan pasangan calon perseorangan (independen) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

Untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah kursi DPRD Kota Bandar Lampung.

Berikut tabel di bawah menunjukkan banyaknya anggota DPRD Kota Bandar Lampung menurut fraksi partai politik atas hasil pemilu legislatif 2009 :

Tabel 4.3

Banyaknya Anggota DPRD Kota Bandar Lampung
Menurut Fraksi Tahun 2010

Fraksi	Jumlah Anggota DPRD
Fraksi Demokrat	10
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
Fraksi Golongan Karya	8
Fraksi Keadilan Sejahtera	5
Fraksi Partai Amanat Nasional	5
	4
Fraksi Gerindra	4
Fraksi PPP	4
Fraksi Hati Nurani Rakyat	
JUMLAH	45

Sumber: BPS, Bandar Lampung Dalam Angka 2011

Untuk pasangan calon independen, jika jumlah penduduk Provinsi lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa maka, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 4 persen. Dan Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota.

Provinsi Lampung masuk dalam kategori tersebut dengan jumlah jiwanya sekitar 7.529.718 orang, sehingga Kota Bandar Lampung yang berpenduduk sekitar 822.253 jiwa, calon independen harus mempunyai dukungan sekitar 32.890 jiwa. Untuk Kota Bandar Lampung yang memiliki 13 Kecamatan, maka dukungan calon independen harus tersebar minimal di 7 Kecamatan

Bukti dukungan untuk calon independen tidak hanya berupa fotocopy KTP, melainkan harus membuat surat pernyataan dukungan yang terdapat dalam formulir model B-1PKWK-KPU yang dibagikan oleh KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi tandatangan dan cap jempol.

Ketentuan lainnya yaitu, Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPUD Provinsi, dan KPUD Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan.

Proses perekrutan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dilaksanakan setelah seluruh perangkat penyelenggara Pilkada (PPS, PPK dan Panwas) 2010 mulai terbentuk. Direncanakan pembentukan perangkat penyelenggara Pilkada 2010 sekitar November 2009 dan paling lambat sekitar Januari 2010.

Berikut tabel 4.1 di bawah menunjukkan nomor urut dan partai pengusung dari masing-masing calon walikota dan wakilwalikota :

Tabel : 4.4

Daftar Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung
Serta Partai Politik Pengusung

No	Nama calon walikota dan wakilwalikota	Partai Pengusung
1	Sauki Shobier-Syamsul Rizal	Non Kepartaian (Independen)
2	Herman HN-Thabroni Harun	PDIP dan koalisi 20 partai kecil
3	Kherlani-Heru Sambodo	Golkar, PKB, dan Hanura
4	Eddy Sutrisno-Hantoni Hasan	Partai Demokrat, PKS, Gerindra, PPP, PAN, dan 5 koalisi partai kecil
5	Dhomiril Hakim-Sugiyanto	Non Kepartaian (Independen)
6	Nurdiono-Dian Kurnia Laratte	Non Kepartaian (Independen)

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung

Pilkada Kota Bandar Lampung yang diiukuti enam pasangan calon tersebut memperebutkan 643.653 suara yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang terbagi dalam 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan.

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pilkada 30 Juni lalu. Meski sempat tertunda satu hari, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menetapkan pasangan Herman HN-Tobroni Harun (atau julukan Mantab) terpilih sebagai wali kota Bandar Lampung periode 2010-2015. Berdasarkan hasil pleno KPUD, pasangan Mantab (diusung PDIP dan 20 koalisi partai kecil) memperoleh suara mutlak 34,67 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 643.653 pemilih. Berikut adalah tabel 4.2 menunjukkan hasil pemilukada Kota Bandar Lampung 30 Juni 2010.

Tabel : 4.5

Daftar Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Serta
Hasil Perolehan Suara

No	Nama calon walikota dan wakilwalikota	Perolehan suara (%)
1	Sauki Shobier-Syamsul Rizal	2,62 %
2	Herman HN-Thabroni Harun	34,67 %
3	Kherlani-Heru Sambodo	29,71 %
4	Eddy Sutrisno-Hantoni Hasan	27,77 %
5	Dhomiril Hakim-Sugiyanto	2,62 %
6	Nurdiono-Dian Kurnia Laratte	2,55 %

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung 2010

Ironisnya, incumbent Walikota Eddy Sutrisno yang berpasangan dengan Hantoni Hasan yang berasal dari kader Partai Keadilan Sosial (PKS), dan icumbent Wakil Walikota Kherlani yang berpasangan dengan Heru Sembodo yang merupakan anggota DPRD Kota Bandar Lampung Fraksi Golkar yang juga anak kadung dari ketua DPD Partai Golkar Lampung mengalami nasib sama. Hanya saja pasangan Khado justru lebih unggul dengan perolehan suara 29,71% dibandingkan dengan pasangan Esha yang hanya memperoleh suara sebesar 27,77%.